

Hendra Kurniawan
hendrayang7@gmail.com

Dosen Pendidikan Sejarah
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Menekuni kajian
sejarah Tionghoa



Tionghoa dalam Kebangsaan

Dalam sejarah nasional disepakati masa pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi modern Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Anggota organisasi ini didominasi kaum intelektual Jawa, namun BO dianggap sebagai pelopor berdirinya organisasi pergerakan nasional. Apabila menilik lebih jauh, sebelum BO berdiri telah terdapat organisasi modern serupa di kalangan masyarakat Tionghoa.

Organisasi masyarakat Tionghoa ini terbukti juga memberi pengaruh kuat bagi kemunculan pergerakan nasional. Merujuk A.K. Pringgodigdo (1994), pergerakan nasional memiliki makna yang luas, bukan hanya soal aksi politik, namun juga ekonomi, kebudayaan, keagamaan, pendidikan, perempuan, dan pemuda.

Dari segi kewilayahan, pergerakan nasional berarti meliputi setiap sudut geografis negeri ini. Pergerakan bukan hanya milik kelompok radikal, namun juga yang kooperatif. Bukan hanya golongan kebangsaan tetapi juga gerakan keagamaan, marxis, dan berbagai komunitas lainnya.

Artinya pergerakan nasional adalah milik semua, termasuk masyarakat Tionghoa. Berangkat dari konsep tersebut, menjadi ironis apabila selama ini masyarakat Tionghoa absen dari historiografi sejarah pergerakan nasional.

Kontribusi etnis Tionghoa masih dipandang sebelah mata dalam konstruksi sejarah nasional,

padahal ada kenyataan yang tidak dapat dimungkiri. Etnis Tionghoa menjadi salah satu elemen dari entitas kebangsaan Indonesia bersama dengan etnis dan suku lainnya.

Jauh sebelum datangnya kolonialisme, orang-orang Tionghoa telah hadir dan hidup bersama dengan berbagai komunitas di bumi Nusantara. Dalam perjumpaan inilah masyarakat Tionghoa terus bergaul dan berdinamika hingga menorehkan kisah sejarah pada setiap masanya.

Menjelang awal abad ke-20, bersamaan dengan kekalahan Tiongkok atas Jepang, mulai bangkit rasa nasionalisme orang-orang Tionghoa, termasuk para Hoakiau di perantauan.

Hal ini turut memengaruhi masyarakat Tionghoa di Indonesia yang lantas mendirikan organisasi sosial politik. Kali pertama muncul gerakan kaum muda Tionghoa yang disebut Jong Chineseche Beweging.

Gerakan ini memprotes aturan diskriminasi zona tempat tinggal (*wijkenstelsel*) atau kawasan pecinan dan aturan surat jalan (*passenstelsel*) yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap masyarakat Tionghoa.

Pada 17 Maret 1900 di Patekoan, Batavia, delapan tahun sebelum BO lahir, berdirilah Tionghoa Hwee Koan (THHK) yang membuka sekolah-sekolah Tionghoa. Phoa Keng Hek diangkat sebagai Presiden THHK yang pertama.

Hingga tahun 1919 ada 250 unit lebih sekolah THHK di Hindia Belanda. Berdirinya THHK disusul lahirnya berbagai surat

kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa.

Surat kabar tersebut seperti *Li Po* (1901) di Sukabumi, *Pewart Soerabaia* (1902) dan *Loen Boen* (1903) di Surabaya, *Djawa Tengah* (1909) di Semarang, serta *Sin Po* (1910) di Batavia.

Organisasi dan berbagai surat kabar tersebut semakin memperkuat rasa persatuan Tionghoa di Hindia Belanda. Melihat kenyataan itu, pemerintah Kolonial Belanda merasa khawatir dan segera meresponsnya dengan mendirikan Biro Urusan Cina untuk mengontrol gerakan masyarakat Tionghoa.

Kesadaran nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di kalangan Tionghoa. Mereka sendiri mendorong perubahan dalam THHK, seperti Kwee Hing Tjiat yang memandang bahwa hidup bersama di Hindia Belanda (Indonesia) adalah masa depan Tionghoa, bukan untuk kembali ke Tiongkok.

Tokoh Tionghoa nasionalis, Liem Koen Hian, juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan tanah air bagi golongan Tionghoa. Untuk mewujudkannya, Liem Koen Hian bersama dengan warga Tionghoa di Surabaya yang disokong oleh kaum nasionalis lainnya, seperti dr. Soetomo dan Soeroso, mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) pada 25 September 1932.

Harus Objektif

PTI bertujuan membantu kemajuan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia hingga menjadi satu negeri dengan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh rakyatnya. Perjuangan PTI tidak setengah-setengah.

Dalam Gabungan Politik Indonesia

(Gapi), PTI meminta status keanggotaan penuh dan menolak keanggotaan luar biasa. Artinya PTI dengan tegas menyatakan garis perjuangannya ikut meraih kemerdekaan Indonesia. Kenyataan sejarah ini tidak bisa dihilangkan begitu saja.

Sejarah harus objektif dan mampu menampung berbagai kekuatan yang memengaruhi perkembangan masyarakat. Sejarah nasional perlu mengungkap aktivitas dari berbagai golongan masyarakat, termasuk Tionghoa, dan bukan hanya yang mayoritas.

Sampai sekarang pun Tionghoa melalui berbagai organisasi maupun perorangan terus berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai persoalan ini niscaya dapat menghindari konflik guna menuju penguatan integrasi bangsa.

Keberadaan THHK dan PTI menjadi dua bukti nyata bahwa Tionghoa bersama organisasi pergerakan nasional lainnya turut andil dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Setiap anak bangsa, termasuk Tionghoa, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pengabdian untuk negeri ini.

Sejarah telah menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa memiliki *sense of belonging* terhadap Indonesia sebagai tanah air dan tanah tumpah darah mereka.

Apabila sejarah pergerakan nasional telah lama mencatat peran Douwes Dekker yang Indo-Belanda, A.R. Baswedan yang keturunan Arab, lantas kapan Tionghoa juga akan mendapat tempat?